

**HEIDELBERGCEMENT**

**Unofficial Translation**

**PEDOMAN GROUP TENTANG HUKUM PERSAINGAN**  
**Group Competition Law Guidelines**

Berlaku untuk : **Semua Perusahaan dalam HeidelbergCement Group**  
Applicable to : All companies of the HeidelbergCement Group

Disusun oleh : **Group Legal & Compliance**  
Created by : Group Legal & Compliance

Tanggal terbit : ~~28 Februari 2018~~ 26 Februari 2021  
Date of issue : February 26, 2021

## Daftar isi/ Table of Contents

Pendahuluan.....	3
Introduction	
1. Komitmen untuk mematuhi hukum persaingan.....	4
Commitment to compliance with competition law	
2. Tanggung Jawab.....	5
Responsibilities	
3. Hal-hal mendasar dari tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.....	5
The basic “dos and don’ts” of competition law	
4. Konsekuensi hukum dan gugatan atas pelanggaran terhadap hukum persaingan.....	9
Legal consequences and actions against competition law violations	
5. Tata perilaku yang paling penting.....	10
The most important rules of conduct	
6. Informasi dan pelatihan.....	11
Information and training	
7. Dokumentasi, pemantauan, telepon.....	12
Documentation, monitoring, hotline	
8. Pelaporan.....	14
Reporting	
9. Tindakan yang dilakukan dalam hal terjadi investigasi hukum persaingan.....	14
Conduct in the event of competition law investigations	
10. Pelaksanaan dan Persyaratan Minimum Yang Wajib Tercantum dalam Pedoman Hukum Persaingan Nasional.....	15
Implementation and minimum requirements for national competition law guidelines	
11. Peraturan Kepatuhan Semen Abu Khusus untuk Negara EEA.....	16
Specific Grey Cement/Cementitious compliance rules for EEA Countries	

**HEIDELBERGCEMENT**

<b>Pendahuluan</b>	<b>Introduction</b>
<p>Pedoman ini (seperti yang disesuaikan dari waktu ke waktu) merupakan bagian dari program kepatuhan HeidelbergCement Group. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum persaingan <b>lebih jauh mendefinisikan</b> pernyataan-pernyataan dan arahan-arahan yang relevan pada Bab <b>2.1</b> dari Pedoman Perilaku Bisnis yang menyangkut hal-hal tertentu. Pedoman ini merupakan pedoman khusus untuk tujuan pasal 2.3 Kebijakan Kepatuhan Group. Pedoman ini pertama kali diadopsi oleh Vorstand dan mulai berlaku di seluruh Group dan dipublikasikan di Intranet pada 26 Juni 2008. Pedoman ini berlaku untuk semua perusahaan HeidelbergCement Group<sup>1</sup>.</p> <p>Secara garis besar, Pedoman ini bersifat kerangka dan harus dilaksanakan dan dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dalam pedoman nasional. Karena adanya perbedaan antara hukum persaingan di setiap negara, maka hanya unsur-unsur umum dari ketentuan-ketentuan yang signifikan untuk mamatuhi hukum persaingan yang akan dirujuk. Ketentuan-ketentuan ini berlaku secara konsisten di semua negara terlepas dari hukum nasionalnya. Pedoman ini menitikberatkan pada penetapan persyaratan-persyaratan minimum untuk setiap pedoman khusus yang akan dikeluarkan di setiap negara. Setelah penyelidikan yang cukup lama dari Komisi Eropa atas pasar semen abu-abu di negara-negara Eropa tertentu HeidelbergCement memutuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan tertentu dalam semen abu-abu dan produk semen lainnya di semua negara EEA (European Economic Area = semua negara anggota Uni Eropa dan Islandia, Liechtenstein dan Norwegia), yang diletakkan di bawah bab 11.</p> <p>Pedoman ini ditujukan terutama bagi mereka yang bertanggung jawab mengeluarkan pedoman tentang hukum persaingan nasional, yaitu para kepala perusahaan yang ada di setiap negara (CEO, COO atau GM) dan para kepala departemen hukum <b>dan/atau kepatuhan</b> di negara-negara tersebut. Sebelum prosedur hukum persaingan dibuat di tingkat nasional, dokumen ini berlaku secara langsung kepada seluruh karyawan yang menghadapi masalah hukum persaingan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Selain manajemen senior, pedoman ini pertama-tama wajib dipahami oleh semua manajer yang terlibat dalam</p>	<p>This Guideline (as amended from time to time) is part of HeidelbergCement Group's compliance programme. It aims to prevent competition law violations and <b>further defines the</b> relevant statements and directives in Chapter <b>2.1</b> of the Code of Business Conduct in specific terms. It forms a special/ functional guideline for the purposes of Section 4 of the Group Compliance Policy. The Guideline was first adopted by the Vorstand and came into effect across the Group with its publication on the Intranet on June 26, 2008. It applies to all companies of the HeidelbergCement Group*.</p> <p>To a large extent, the Guideline has the nature of a framework and must be implemented and set out in more specific terms by national guidelines. Because of the differences between each country's competition laws, only the common and general elements of the material requirements for compliance with competition law are referred to. These apply consistently in all countries irrespective of specific national laws. The Guideline focuses on establishing minimum requirements for each set of country specific guidelines that will be issued. Following a long lasting investigation of the European Commission of the grey cement markets in certain European countries HeidelbergCement decided to adhere to certain compliance principles in its grey cement and cementitious products business in all EEA countries (European Economic Area = all EU member states and Iceland, Liechtenstein and Norway), which are laid out under chapter 11.</p> <p>The Guideline is aimed primarily at those responsible for issuing a national competition law guideline, i.e. the heads of country organisations (CEO, COO or GM) and the heads of the countries' legal departments <b>and/or compliance officers</b>. Until a competition law procedure has been established at national level, the present document also applies directly to all employees who encounter competition law issues in the performance of their tasks. Besides senior management, these are first of all managers involved in sales, but as well managers involved in procurement and M&amp;A projects. <b>Even for technicians the Guideline becomes particularly</b></p>

<sup>1</sup> HeidelbergCement AG dan semua perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh HeidelbergCement AG. Definisi dan aturan Kebijakan Kepatuhan Grup untuk entitas gabungan juga mengacu pada Panduan ini.

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>penjualan dan juga para manajer yang terlibat dalam pengadaan dan proyek M&amp;A. <b>Bahkan bagi teknisi, Pedoman ini menjadi sangat relevan, ketika mereka bertemu dengan perwakilan pesaing dalam asosiasi bisnis atau proyek kerja sama.</b></p>	<p><b>relevant, when they meet representatives of competitors in business associations or cooperation projects.</b></p>
<p><b>1. Komitmen untuk mematuhi hukum persaingan</b></p>	<p><b>1. Commitment to compliance with competition law</b></p>
<p>1.1. Kepatuhan terhadap hukum adalah bagian dari citra perusahaan sebagaimana tercantum dalam <b>Pedoman Perilaku Bisnis</b> dan Prinsip-prinsip Kepemimpinan <b>kita</b>. Peraturan-peraturan tentang hukum persaingan memiliki arti penting tersendiri. Hukum persaingan adalah elemen penting dari ekonomi pasar bebas. Tujuannya adalah untuk melindungi persaingan bebas sebagai cara untuk terus meningkatkan efisiensi ekonomi dari setiap pembatasan yang diberlakukan oleh pelaku pasar itu sendiri, dan melarang adanya kartel ilegal dan praktek-praktek perdagangan yang membatasi persaingan. HeidelbergCement secara tegas berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum persaingan dan tidak akan mengurangi upayanya untuk mewujudkan hal tersebut terutama dalam bidang ini.</p> <p>1.2. Pelanggaran hukum persaingan tidak dapat "dibayar". Risiko denda berat atau tuntutan ganti rugi di beberapa negara, bahkan risiko hukuman pidana hingga kurungan penjara bagi mereka yang bertanggung jawab secara pribadi melebihi manfaat apapun yang kemungkinan akan diperoleh. Selain itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar kepada perusahaan dan merusak reputasi Perusahaan. Ada kemungkinan yang kuat bahwa semua pelanggaran terhadap hukum persaingan pasti akan diketahui. Hal ini karena, seperti semua produsen barang yang sifatnya homogen dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan bangunan, kita merupakan target dari lembaga pengawas persaingan. Selain itu, di banyak negara, ada program-program keringanan hukuman dengan kompensasi pengurangan hukuman bagi para pelaku pelanggaran hukum persaingan yang bersedia bekerja sama dan memberikan pernyataan, atau "<i>whistleblow</i>" (memberikan informasi) yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pesaing mereka.</p> <p>1.3. Kami mematuhi ketentuan hukum persaingan bukan hanya untuk menghindari denda dan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan. Hukum persaingan juga mewajibkan dan</p>	<p>1.1. Compliance with the law is part of our corporate image as set out in the <b>Code of Business Conduct and our Leadership Principles and Code of Business Conduct</b>. The regulations of competition law have particular significance. Competition law is an essential element of a free-market economy. It aims to protect free competition as a means of continuously improving economic efficiency from any restrictions put in place by the market players themselves, and prohibits unlawful cartels and trade practises that restrict competition. HeidelbergCement is expressly committed to observing the regulations of competition law and will not lessen its compliance efforts, particularly in this field.</p> <p>1.2. Competition law violations do not "pay off". The risk of heavy fines or claims for damages, in some countries even the risk of criminal penalties extending to imprisonment for those personally responsible, outweighs any perceived benefit. Also, breach of competition law would result in the loss of confidence in our organisation within our market and general damage to the Company's reputation. There is a strong probability that all competition law violations will be discovered. This is because, like all manufacturers of homogeneous mass goods and companies in the building materials industry, we are particularly targeted by the competition authorities. Furthermore, in many countries, there are leniency programmes with attractive reduced penalty offers for perpetrators of competition law violations who are willing to cooperate and make statements, or "<i>whistleblow</i>" in relation to the activities of their competitors.</p> <p>1.3. We comply with the requirements of competition law, not only to avoid the penalties and sanctions set out under the relevant laws. Competition law also requires and encourages our business to be</p>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>mendorong agar kegiatan usaha dilakukan secara adil dalam suatu pasar bebas di mana semua pelaku tunduk pada aturan dan peraturan yang sama. Hal ini memberi peluang terbesar kepada Perusahaan untuk sukses karena peraturan tersebut memberikan jalan kepada kegiatan bisnis kita untuk bekerja dengan berpedoman pada dan meraih standar tertinggi dalam hal efisiensi, hubungan dengan pelanggan dan penawaran produk.</p>	<p>carried out fairly within a free market where all players are subject to the same set of rules and regulations. This gives our Company the greatest chance of success as it incentivizes our business to work towards the highest standards of efficiency, customer relations and product offerings.</p>
<p><b>2. Tanggung Jawab</b></p>	<p><b>2. Responsibilities</b></p>
<p>2.1 Tanggung jawab untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum persaingan terletak pada setiap karyawan yang menghadapi masalah-masalah yang relevan dengan hukum persaingan, dan terutama berlaku untuk manajemen senior dan para manajer yang terlibat dalam penjualan, pengadaan dan proyek M&amp;A. <b>Bahkan bagi teknisi, Pedoman ini menjadi sangat relevan, ketika mereka bertemu dengan perwakilan pesaing dalam asosiasi bisnis atau proyek kerja sama.</b> Setiap karyawan wajib memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat menilai secara tepat masalah-masalah tersebut dan, dalam hal tersebut, berkonsultasi dengan lembaga ahli, umumnya departemen hukum yang kompeten apabila diperlukan pada tahap awal.</p> <p>2.2 Atasan yang relevan harus memilih, memberikan instruksi dan memantau bawahan mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan-peraturan hukum persaingan.</p> <p>2.3 Keseluruhan tanggung jawab untuk mematuhi hukum persaingan di tingkat nasional terletak pada kepala organisasi di tingkat negara (CEO, COO atau GM). Dalam melaksanakan tugas ini mereka biasanya didukung oleh kepala departemen hukum di tingkat nasional.</p>	<p>2.1. Responsibility for observing the regulations of competition law lies with every employee who encounters issues relevant to competition law, which particularly applies to senior management and managers involved in sales, procurement and M&amp;A projects. <b>Even for technicians the Guideline becomes particularly relevant, when they meet representatives of competitors in business associations or cooperation projects.</b> Every employee is obliged to acquire the necessary knowledge to suitably assess such issues and, in this regard, to consult expert bodies, generally the competent legal department, to the necessary extent at an early stage.</p> <p>2.2 The relevant superiors must select, instruct and monitor their employees to ensure that they observe the regulations of competition law.</p> <p>2.3 Overall responsibility for compliance with competition law at national level lies with the heads of country organisations (CEO, COO or GM). They are usually supported in this task by the heads of the national legal departments.</p>
<p><b>3. Tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan</b></p>	<p><b>3. The basic “do’s and don’ts” of competition law</b></p>
<p><b>3.1 - Penjelasan Awal –</b></p> <p>Hampir semua negara telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi persaingan bebas dan memiliki lembaga-lembaga pengawas yang bertugas memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum-hukum tersebut. Aturan-aturan di Uni Eropa (Pasal 101, 102 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa), yang merupakan persyaratan minimum dari undang-undang persaingan dari negara-negara anggota</p>	<p><b>3.1 - Preliminary remark –</b></p> <p>Almost all countries have issued laws to protect free competition and have administrative bodies that monitor and enforce compliance with these laws. The rules of the European Union (Art. 101, 102 of the Treaty on the Functioning of the EU), which represent the minimum requirements for the member states' competition laws, apply to the countries of the European Union. Consequently, the competition</p>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>berlaku untuk negara-negara Uni Eropa. Oleh sebab itu, undang-undang persaingan yang berlaku di Uni Eropa sebagian besar konsisten satu sama lain.</p> <p>Hampir semua hukum persaingan membedakan antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Larangan Umum kartel</li> <li>- Larangan penyalahgunaan posisi pasar yang dominan</li> <li>- Pengawasan Merger</li> </ul>	<p>legislation applicable within the European Union is largely consistent.</p> <p>Almost all competition laws distinguish between:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General prohibition of cartels</li> <li>- Prohibition of the abuse of a dominant market position</li> <li>- Merger control</li> </ul>
<p><b>3.2 - Larangan Kartel –</b></p> <p>Larangan umum kartel melarang perjanjian-perjanjian, keputusan-keputusan dan perilaku terkoordinasi (selanjutnya disebut "pengaturan") yang dibuat oleh dua atau lebih perusahaan atau asosiasi perdagangan yang melakukannya untuk atau bahkan sekedar bertujuan untuk mengurangi tingkat kompetisi.</p> <p>3.2.1. Biasanya pengaturan antara pesaing (hubungan horizontal) tergolong dalam kategori larangan ini, terutama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penetapan harga atau komponen-komponen harga (pengurangan harga, diskon, bunga dll) atau ketentuan-ketentuan bisnis yang signifikan (jaminan, syarat pembayaran, persyaratan pengiriman dll);</li> <li>– Penetapan kenaikan harga;</li> <li>– Pengaturan distribusi pasar berdasarkan produk, wilayah, pelanggan atau pangsa pasar;</li> <li>– Pengaturan kuota pengiriman;</li> <li>– Pengaturan mengenai pemanfaatan kapasitas dan jangkauan produk;</li> <li>– Pertukaran informasi tentang harga, pangsa pasar, pelanggan atau keadaan lain yang relevan dengan kompetisi;</li> <li>– Menghilangkan kompetisi dengan cara merger dan akuisisi;</li> <li>– Menetapkan penawaran dalam prosedur tender.</li> </ul> <p>3.2.2 Pengaturan yang dilakukan antara pemasok dan pembeli (hubungan vertikal) yang berakibat membatasi persaingan juga dilarang atau diperbolehkan hanya sampai batas-batas tertentu, terutama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perjanjian-perjanjian eksklusivitas;</li> <li>– Perjanjian pasokan jangka panjang untuk memenuhi sebagian besar permintaan pembeli;</li> <li>– Kesepakatan tentang harga tetap atau harga minimum untuk dijual kembali atau pembatasan lainnya tentang penjualan kembali.</li> </ul> <p>3.2.3 Dalam kasus-kasus luar biasa, jenis pengaturan-pengaturan yang diuraikan di atas dapat diijinkan baik dalam hubungan horisontal maupun hubungan vertikal.</p>	<p><b>3.2 - Prohibition of Cartels –</b></p> <p>The general prohibition of cartels prohibits agreements, decisions and co-ordinated behavior (hereinafter referred to as "arrangements") by two or more companies or trade associations that bring about or even simply aim to bring about a substantial lessening of competition.</p> <p>3.2.1 Typically arrangements between competitors (horizontal relationship) fall under this prohibition, particularly</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixing of prices or price components (reductions, discounts, interest etc.) or significant terms of business (guarantees, payment terms, delivery terms etc.);</li> <li>- Fixing of price increases;</li> <li>- The arranged distribution of markets by products, regions, customers or market shares;</li> <li>- The arrangement of delivery quotas;</li> <li>- Arrangements regarding capacity utilisation and product ranges;</li> <li>- The exchange of information regarding prices, market shares, customers or other circumstances relevant to competition;</li> <li>- Buying out the competition, by way of mergers and acquisitions;</li> <li>- Fixing bids in tendering procedures.</li> </ul> <p>3.2.2 Arrangements between suppliers and purchasers (vertical relationship) with the effect of restricting competition are also prohibited or are permissible only to a limited extent, particularly</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exclusivity agreements;</li> <li>- Long-term supply agreements for the majority of the purchaser's requirements;</li> <li>- Agreements about fixed or minimum prices for resale or other restrictions on resale.</li> </ul>

## HEIDELBERGCEMENT

<p>Namun, hal ini tergantung pada kondisi ketat yang, sebagai suatu peraturan, hanya dapat diperiksa oleh ahli hukum persaingan.</p> <p><b>3.2.4 Dalam keadaan tertentu, entitas bahkan dapat bertanggung jawab atas pengaturan yang dilarang oleh agen penjualan pihak ketiga yang terlibat dalam rantai distribusi, jika sudah atau mungkin menyadarinya.</b></p>	<p>3.2.3 In exceptional cases, arrangements of the type described above may be permissible in both horizontal and vertical relationships. However, these will be subject to strict conditions that, as a rule, can only be reliably checked by a competition law expert.</p> <p><b>3.2.4 Under certain circumstances an entity can even be responsible for prohibited arrangements of third-party sales agents involved in the distribution chain, if it is or could be aware of these.</b></p>
<p><b>3.3 - Larangan penyalahgunaan posisi pasar yang dominan –</b></p> <p>Larangan penyalahgunaan posisi pasar yang dominan pada dasarnya berhubungan dengan posisi pasar yang sangat kuat yang memungkinkan perusahaan untuk memberlakukan kondisi-kondisi dan tindakan-tindakan yang, tanpa posisi pasar yang kuat, tidak akan dapat diberlakukan atau sulit untuk diberlakukan.</p> <p>3.3.1 Terdapat aturan yang berbeda-beda di masing-masing negara yang mengatur tentang seberapa kuat posisi pasar sehingga dapat dianggap dominan dalam artian larangan ini. Kriteria yang paling penting adalah pangsa pasar dari produk yang relevan. Hukum persaingan Uni Eropa umumnya menganggap pangsa pasar sebesar 40% atau lebih sebagai sebuah indikasi dari posisi pasar yang dominan. Di negara-negara lain, dan dalam kondisi tertentu pada level Uni Eropa, pangsa pasar yang lebih kecil dapat dianggap sebagai posisi dominan atau bermasalah. Pasar saham dapat dianalisis pada tingkat nasional dan regional.</p> <p>3.3.2 Kasus-kasus khusus tentang larangan penyalahgunaan posisi dominan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Memberlakukan persyaratan-persyaratan yang tidak tepat, terutama <b>harga yang terlalu tinggi</b>;</li> <li>– Menggunakan metode jual rugi (<i>predatory pricing</i>) dengan tujuan untuk menggerakkan kompetitor keluar dari pasar;</li> <li>– Membatasi pengembangan produk, pembuatan produk atau penjualan produk;</li> <li>– Perlakuan diskriminatif terhadap mitra dagang secara faktual dan tidak dapat dibenarkan;</li> <li>– Kegagalan untuk memasok pembeli tanpa alasan-alasan yang benar;</li> </ul>	<p><b>3.3 - Prohibition of the abuse of a dominant market position –</b></p> <p>The prohibition of the abuse of a dominant market position essentially relates to a particularly strong market position that allows a company to enforce conditions and measures that, without the strong market position, would not be enforceable or would be difficult to enforce.</p> <p>3.3.1 There are different rules in the individual countries governing how strong a market position must be in order for it to be regarded as dominant in the sense of this prohibition. The most important criterion is the market share with the relevant product. EU competition law generally regards a market share of 40% or above as an indication of a dominant market position. In other countries, and under certain circumstances at EU level, a smaller market share may be considered a dominant or otherwise problematic position. Market shares can be analysed on both national and regional levels.</p> <p>3.3.2 Typical cases of prohibited abuse of a dominant position are</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enforcing inappropriate conditions, particularly <b>too high</b> prices</li> <li>- Using predatory (very low) prices aiming to drive remaining competitors out of the market;</li> <li>- Restricting product development, product manufacturing or product sales;</li> <li>- Factually unjustified discriminative treatment of trading partners;</li> <li>- Failure to supply a buyer without factual justification;</li> <li>- Supplying a customer only if they purchase other products that are not connected with the primary product requested;</li> <li>- Abusive rebate systems, in particular loyalty rebates.</li> </ul>

**HEIDELBERGCEMENT**

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memasok pelanggan hanya jika mereka membeli produk lain yang tidak terkait dengan produk utama yang diminta;</li> <li>– Penyalahgunaan sistem rabat terutama rabat loyalty.</li> </ul>	
<p><b>3.4 - Pengawasan Merger –</b></p> <p>Pengawasan merger adalah prosedur pengawasan khusus untuk menyelidiki apakah pembelian suatu perusahaan secara sengaja atau partisipasi atau merger lain yang dilakukan secara sengaja menyebabkan timbulnya pembatasan persaingan yang tidak diinginkan secara ekonomi. Kasus seperti ini secara umum dianggap ada jika proposal merger mengarah pada penciptaan atau penguatan posisi pasar yang dominan. Jika dapat diterapkan, proposal seperti itu adalah dilarang dan tidak boleh dilaksanakan. Hampir semua hukum mewajibkan perusahaan-perusahaan <b>dengan</b> ukuran tertentu untuk mengajukan proposal semacam ini - jika mereka melebihi batas tertentu - kepada badan pengawas persaingan yang kompeten berikut informasi yang diperlukan untuk melakukan investigasi sebelum proposal tersebut dilaksanakan. Kemudian prosedur yang sebagian besar sudah diformalkan akan diberlakukan; hal ini hanya dapat dilakukan secara kompeten dengan melibatkan ahli hukum persaingan. Sebelum prosedur ini diselesaikan secara resmi, tindakan apapun untuk melaksanakan merger <b>biasanya</b> dilarang.</p>	<p><b>3.4 - Merger control –</b></p> <p>Merger control is a specific regulatory procedure for investigating whether an intended purchase of a company or participation or other intended mergers bring about an economically undesirable restriction of competition. Such a case is generally deemed to exist if the proposal leads to a dominant market position being created or strengthened. Where applicable, the proposal is prohibited and may not be carried out. Almost all competition laws require that companies <b>of</b> certain size present proposals of this kind – if they exceed a certain relevance threshold – to the competent competition authorities, together with the information required for the investigation, before the proposals are carried out. A largely formalised procedure then follows; this can only be carried out competently with the involvement of competition law experts. Before this procedure is formally completed, any measures to effect the merger are <b>usually</b> prohibited.</p>
<p><b>3.5 - Kartel Internasional –</b></p> <p>Dalam beberapa kasus, penetapan harga dan pengaturan kartel lainnya dapat melibatkan atau mempengaruhi perdagangan di lebih dari satu negara. Lembaga penegak hukum semakin gencar melakukan kerjasama dalam upaya penyelidikan kartel internasional dan saling berbagi informasi. Saat ini investigasi terhadap kartel di satu negara sering menyebabkan perluasan penyelidikan di negara-negara lain yang terkena dampak. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, berusaha untuk menegakkan hukum persaingan mereka (termasuk hukum pidana dengan ancaman hukuman penjara) terhadap para peserta kartel di negara-negara lain di mana kartel memiliki pengaruh besar di Amerika Serikat. Anda tidak dapat berasumsi bahwa konsekuensi hukum dari kartel yang mempengaruhi satu negara dapat dihindari dengan cara berkolusi, atau karena semua peserta kartel berada di negara lain.</p>	<p><b>3.5 - International Cartels –</b></p> <p>In some cases, price fixing and other cartel arrangements may involve or affect trade in more than one country. Enforcement authorities increasingly co-operate in international cartel investigations and share information. Investigations of cartels in one country now frequently lead to expanded investigations in other affected countries. Some jurisdictions, such as the United States, seek to enforce their competition laws (including criminal laws with potential imprisonment penalties) against cartel participants in other countries where the cartel has a substantial effect in the United States. You should not assume that the legal consequences of a cartel affecting one country will be avoided because the collusive conduct occurs, or the participants are all located, in another country.</p>



**HEIDELBERGCEMENT**

4. Konsekuensi hukum dan gugatan terhadap pelanggaran hukum persaingan	4. Legal consequences and actions against competition law violations
<p>4.1 Pelanggaran atas peraturan-peraturan hukum persaingan adalah <b>pelanggaran yang dapat dikenai hukuman</b> oleh semua hukum persaingan. Perusahaan akan dikenakan hukuman, selain itu - di banyak negara – juga hukuman terhadap setiap individu yang bertanggung jawab secara pribadi. Di beberapa negara, termasuk Israel, Norwegia, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, yang terakhir disebutkan bahkan diancam dengan hukuman penjara. Denda kepada perusahaan umumnya ditetapkan oleh pengadilan sehingga jumlahnya lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh karena pelanggaran terhadap hukum persaingan. Denda ini dapat mencapai puluhan atau ratusan juta Euro; di Uni Eropa, denda maksimal adalah 10% dari omset tahunan grup di seluruh dunia. Beberapa undang-undang persaingan juga menetapkan penyitaan laba ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran hukum persaingan. Dalam kasus-kasus tersebut, total denda dapat dengan mudah dilipatgandakan dari kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh.</p> <p>4.2 Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan, jika ada, pengambilalihan perusahaan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan hukum persaingan adalah <b>batal dan tidak sah demi hukum</b>; akibatnya, tidak ada hak yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut dan, jika berlaku, wajib dilakukan transaksi mundur.</p> <p>4.3 Para pelanggan dan pesaing yang dirugikan umumnya berhak untuk <b>menuntut ganti rugi</b>. Dalam beberapa undang-undang persaingan, kemudahan persyaratan atau kemungkinan <i>class action</i> berlaku untuk tuntutan ganti rugi semacam ini.</p> <p>4.4 Selain itu, pelanggaran hukum persaingan selalu menyiratkan pelanggaran terhadap kewajiban kontrak. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut juga mengakibatkan timbulnya <b>tindakan disipliner</b> yang dapat berakibat pada pengakhiran kontrak kerja dengan seketika. Selain itu, Perusahaan akan menyelidiki kemungkinan adanya tuntutan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran hukum persaingan dari karyawan yang bertanggung jawab.</p> <p>4.5 Banyak undang-undang persaingan yang memberikan <b>program keringanan hukuman</b>. Program ini memberikan jaminan pengurangan hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum</p>	<p>4.1. Violations of the competition law regulations are a <b>punishable offence</b> under all competition laws. The companies are always punished, in addition to – in many countries – those personally responsible. In some countries, including Israel, Norway, Russia, United Kingdom and the U.S., the latter may even face the threat of imprisonment. The fines for the companies are generally assessed so that they are higher than the advantage gained as a result of the competition law violation. They can reach tens or hundreds of million Euros; in the EU, the fine will be a maximum of 10% of the group's worldwide annual turnover. Some competition laws also provide for absorption of the economic advantage gained from the competition law violation. In such cases, the total penalty can easily reach a multiple of the advantage that the violation was intended to gain.</p> <p>4.2. The contracts concluded and, if applicable, company takeovers carried out in violation of competition law regulations are <b>legally void and invalid</b>; consequently, no rights may be derived from them and, if applicable, a reverse transaction must take place.</p> <p>4.3. Injured customers and competitors are generally entitled to <b>claim for damages</b>. Under some competition laws, simplified conditions or the possibility of class actions apply to damage claims of this kind.</p> <p>4.4. Furthermore, competition law violations always imply a breach of employment contract obligations. Therefore, they also result in <b>disciplinary measures</b>, which may extend to immediate termination of the employment contract. In addition, the Company will investigate the possibility of claiming compensation for the damage incurred by the Company as a result of the competition law violation from the employee responsible.</p> <p>4.5. Many competition laws include <b>leniency programmes</b>. These guarantee perpetrators of competition law violations reduced penalties and,</p>

## HEIDELBERGCEMENT

<p>persaingan dan, dalam kondisi tertentu, pengampunan penuh, jika mereka bersedia memberitahu lembaga pengawas tentang suatu kartel dan memberikan bukti-bukti yang cukup untuk menghukum pihak-pihak lain yang terlibat. Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan program keringanan ini agar mereka tidak terkena denda hukuman kartel yang dapat mereka terima. Akibatnya, kemungkinan pelanggaran hukum kartel dapat ditemukan telah meningkat secara signifikan.</p> <p>4.6 Di beberapa negara, badan pengawas persaingan telah mengeluarkan <b>pedoman hukuman</b> yang mengatur tentang pengurangan denda apabila perusahaan telah menetapkan inisiatif-inisiatif tertentu dalam rangka kepatuhan terhadap hukum persaingan yang dapat melebihi ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini (misalnya pelaporan dan pemeriksaan setiap hubungan dengan para pesaing). Praktik-praktik terbaik tersebut harus ditetapkan dalam pedoman hukum persaingan di setiap negara masing-masing meskipun praktik tersebut tidak mewakili persyaratan hukum yang ketat.</p>	<p>under certain circumstances, a complete amnesty, if they notify the authorities of a cartel and produce sufficient evidence to convict the other parties involved. More and more companies are making use of this leniency programme in order to avoid an impending cartel penalty. As a result, the probability of cartel law violations being discovered has risen significantly.</p> <p>4.6. In some countries, the competition authorities have issued <b>sentencing guidelines</b> providing for reduced penalties where the company has established specific competition compliance measures that may exceed the requirements contained in this Guideline (e.g. a documented reporting and reviewing of every contact with competitors). Such best practices must be set out in the competition law guidelines of the respective countries, even though they may not represent strict legal requirements.</p>
<p><b>5. Aturan perilaku yang paling penting</b></p>	<p><b>5. The most important rules of conduct</b></p>
<p>Anda dapat menghindari pelanggaran hukum persaingan dengan cara senantiasa mematuhi aturan-aturan perilaku berikut ini secara konsisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangan melakukan pertukaran informasi apapun dengan pesaing tentang       <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ harga atau komponen harga,</li> <li>▪ ketentuan-ketentuan bisnis,</li> <li>▪ <i>sharing</i> (pembagian) atau alokasi wilayah, pelanggan, produk, pangsa pasar,</li> <li>▪ kuota pengiriman,</li> <li>▪ biaya atau kapasitas,</li> <li>▪ rencana investasi,</li> <li>▪ tindakan bersama terhadap pemasok atau pelanggan,</li> <li>▪ menetapkan harga penawaran!</li> </ul> </li> </ul> <p>Hal ini berlaku untuk segala bentuk pertukaran baik secara lisan, melalui surat, e-mail, faksimile atau bahkan (jika penggunaannya diizinkan) layanan pesan instan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hindari dalam komunikasi internal atau eksternal (termasuk email atau pesan elektronik lainnya) bahasa yang dipersingkat, menyesatkan, agresif atau emosional meningkatkan kecurigaan akan perilaku ilegal!</li> <li>- Tinggalkan rapat dengan pesaing - dan, jika berlaku, rapat asosiasi – yang sedang membahas tentang hal-hal untuk menghindari hukum anti persaingan! Pastikan, jika ada, bahwa protes dan tindakan Anda</li> </ul>	<p>You can avoid competition law violations by consistently observing the following rules of conduct at all times:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do not exchange any information with competitors about       <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prices or price components,</li> <li>▪ terms of business,</li> <li>▪ the sharing or allocation of regions, customers, products, market shares,</li> <li>▪ delivery quotas,</li> <li>▪ costs or capacities,</li> <li>▪ intended investments,</li> <li>▪ concerted action against suppliers or customers,</li> <li>▪ fixing bids!</li> </ul> </li> </ul> <p>This applies to any form of exchange be it orally, by mail, e-mail or fax or even (if the use is permissible as such) instant messaging services.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avoid in any internal or external communication (including e-mails or other electronic messaging)</li> </ul>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>meninggalkan pertemuan dicatat dalam risalah rapat!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacat setiap kontak pesaing dengan baik sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan praktik di negara Anda sehingga dapat menjelaskan keabsahannya atau (jika ada) untuk mematuhi praktek-praktek terbaik yang telah ditetapkan.</li> <li>- Untuk perjanjian pasokan atau perjanjian pengadaan jangka panjang, libatkan departemen hukum pada tahap awal!</li> <li>- Jangan menyalahgunakan posisi pasar yang dominan dengan memberlakukan syarat-syarat yang Anda tidak akan mampu menegakkannya tanpa jabatan Anda sekarang!</li> <li>- Patuhi persyaratan pengawasan merger dan libatkan departemen hukum pada tahap awal!</li> <li>- Jangan melakukan merger yang wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum disahkan, sekalipun hanya sebagian!</li> <li>- Jika ragu, konsultasikan dengan manajer lini Anda pada tahap awal dan dengan departemen hukum jika perlu!</li> </ul>	<p>shortened, misleading, aggressive or emotional language raising suspicions of illegal behaviour!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave meetings with competitors – and, if applicable, meetings of associations – in which discussions with anticompetitive content are taking place! Ensure, if applicable, that your protest and your leaving the meeting are recorded in the minutes!</li> <li>- Document any competitor contact appropriately as advisable under your countries jurisdiction and practice in order to be able to explain its lawfulness or (where applicable) to comply with established best practices!</li> <li>- In the case of long-term supply or procurement agreements, involve the legal department at an early stage!</li> <li>- Do not abuse a dominant market position by enforcing conditions that you would not have been able to enforce without this position!</li> <li>- Observe the merger control requirement and involve the legal department at an early stage!</li> <li>- Do not carry out a merger which has to be authorised before it has been authorised, not even partially!</li> <li>- In all cases of doubt, consult your line manager at an early stage, and the legal department if necessary!</li> </ul>
<p><b>6. Informasi, pelatihan dan penilaian hukum persaingan yang dilakukan setiap tahun</b></p>	<p><b>6. Information, training and yearly competition law assessment</b></p>
<p>6.1 Semua karyawan yang mungkin menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum persaingan wajib diberitahu tentang kewajiban-kewajiban tindakan yang ditetapkan di sini dan diberi pelatihan tentang penerapan praktis dari kewajiban-kewajiban tersebut.</p> <p>6.2 informasi dan pelatihan awal diberikan selama karyawan mendapatkan pengenalan tugas oleh atasannya. Hal ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Untuk pelatihan lanjutan, seminar tatap muka internal atau eksternal harus dilakukan, serta rapat internal dan sebagai prioritas, jika ada, modul <i>online e-learning</i> tentang hukum persaingan yang dikembangkan secara khusus untuk HeidelbergCement.</p> <p>6.3 Atasan yang relevan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan mereka ikut ambil bagian dalam pelatihan ini sedikitnya sekali setiap dua tahun, atau lebih sering jika diperlukan. Pemberian pelatihan yang sesuai adalah tanggung jawab departemen hukum nasional atau fungsi-fungsi lain yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum.</p>	<p>6.1. All employees who may encounter issues relevant to competition law must be informed about the obligations of conduct set out here and trained in the practical application of these obligations.</p> <p>6.2. The initial information and training is given when the employee is familiarised with his duties by his superior. It must be carried out extremely thoroughly. For follow-up training, internal or external face-to-face seminars should be used, as well as internal meetings and as a priority, if available, the competition law online e-learning module developed specially for HeidelbergCement.</p> <p>6.3. The relevant superiors are responsible for ensuring that their employees take part in training of this kind at least once every two years, or more often if required. The provision of suitable training is the responsibility of the national legal departments or the other functions responsible for providing legal advice.</p>

## HEIDELBERGCEMENT

<p>6.4 Kepala organisasi nasional dalam Group HeidelbergCement memastikan melalui <b>suatu penilaian hukum kompetisi yang sesuai (yang akan diperbarui setiap tahun)</b> bahwa kegiatan-kegiatan kepatuhan lebih lanjut yang diperlukan sesuai dengan praktek nasional akan dilakukan. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi investigasi internal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, kunjungan ke lokasi baik yang diumumkan atau inspeksi mendadak atau pemeriksaan data, pelaporan kontak pesaing, pemeriksaan wajib terhadap hubungan yang dilakukan dengan para pesaing dll. Penilaian risiko harus mempertimbangkan frekuensi kontak dengan pesaing (khususnya keterlibatan dalam asosiasi perdagangan) dan omset yang diperoleh dari setiap bisnis, keberadaan dan praktek hukum persaingan dan penegakannya (termasuk aturan dan praktek penerapan keringanan hukuman), situasi pasar tertentu seperti penurunan permintaan, over kapasitas, tekanan penetapan harga khusus dll. <b>Lampiran 1</b> berisi checklist untuk penilaian risiko tersebut. Jika memerlukan penilaian risiko tahunan berikut, sistem kepatuhan hukum persaingan nasional dapat disesuaikan secara permanen. <b>Group Legal &amp; Compliance</b> dapat mengatur untuk melakukan evaluasi atas sistem kepatuhan hukum persaingan Grup secara keseluruhan, sekurang-kurangnya setiap 3-4 tahun atau jika terdapat kebutuhan khusus.</p>	<p>6.4. The heads of the national organisations within HeidelbergCement Group ensure by <b>an appropriate competition law assessment (to be updated each year)</b> that any further compliance activities as necessary according to national practice will be executed. Such measures may include internal investigations relating to suspicion of infringements, announced or unannounced on site visits or data screenings, competitor contact reporting, mandatory checks of contracts with competitors etc. The risk assessment should take into account the frequency of competitor contacts (in particular the engagement in trade associations) and the turnover involved in a respective part of the business, the existence and practice of competition law and its enforcement (including rules and practice for leniency applications), specific market situations like decreasing demand, over capacity, specific pricing pressure etc. <b>Annex 1</b> contains a checklist for such risk assessment. If necessary following such yearly risk assessment, the national competition law compliance system will be permanently adjusted. <b>Group Legal &amp; Compliance</b> will arrange for an evaluation of the Group's overall competition law compliance system at least each 3-4 years or if specific need occurs.</p>
<p><b>7. Dokumentasi, pemantauan, hotline</b></p>	<p><b>7. Documentation, monitoring, hotline</b></p>
<p>7.1 Tindakan-tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan harus <b>didokumentasikan</b> dengan benar. Tindakan ini akan membantu memastikan kepastian pelaksanaan Pedoman ini, membebaskan Grup dan karyawan dalam hal terjadi penyelidikan tentang kemungkinan pelanggaran hukum persaingan dan dalam beberapa kasus dapat mengurangi denda uang. Secara khusus, langkah-langkah informasi dan pelatihan tertentu harus didokumentasikan. Jika perlu, data yang bersifat sensitif harus didokumentasikan sedemikian rupa karena data-data tersebut terikat oleh hak istimewa hukum.</p> <p>7.2.1 <b>Group Legal &amp; Compliance</b> bertanggung jawab untuk <b>memantau</b> pelaksanaan Pedoman ini melalui pedoman nasional. Tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan hukum persaingan dan aturan-aturan pelaksanaan Pedoman ini</p>	<p>7.1. Measures to ensure compliance with competition law must be properly <b>documented</b>. This helps to ensure the verifiability of the implementation of this Guideline, absolves the Group and employees in the event of investigations into possible competition law violations and may in some cases reduce a financial penalty. The information and training measures in particular must be documented. If necessary, sensitive data must be documented in such a way that they are subject to legal privilege.</p> <p>7.2.1. <b>Group Legal &amp; Compliance</b> is responsible for monitoring the implementation of this Guideline by means of national guidelines. Responsibility for monitoring compliance with the regulations of competition law and the rules of conduct of</p>

## HEIDELBERGCEMENT

<p>terletak, untuk masing-masing pegawai, <b>pada atasan yang relevan</b> dan untuk organisasi-organisasi nasional, terletak pada <b>kepala organisasi masing-masing (CEO, COO atau GM)</b> yang harus menggunakan alat-alat yang diidentifikasi dalam penilaian risiko tahunan sesuai dengan paragraf 6.4.</p>	<p>this Guideline lies, in respect of individual employees, with <b>the relevant superiors</b> and, in respect to the national organisations, with the respective <b>head (CEO, COO or GM)</b>, which should use the tools identified in the yearly risk assessment in accordance with point 6.4.</p>
<p>7.2.2 Sebagai sebuah tindakan pencegahan umum, kepala bagian di setiap negara mengatur daftar semua karyawan Grup HC di wilayah tanggung jawabnya yang aktif dalam asosiasi bisnis untuk memfasilitasi pelatihan dan pemantauan ketepatan terhadap hukum persaingan dalam hal ini. <b>Selanjutnya, setiap kepala negara HC akan memperkenalkan sistem pemantauan elektronik untuk mengamankan pemeriksaan langsung dari komunikasi elektronik karyawan dengan eksposur risiko anti-trust tinggi (E-Mail Protection System/EMPS) sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan EMPS, kecuali jika sistem seperti itu berlaku. tidak diizinkan secara hukum atau tidak sesuai seperti yang disepakati bersama dengan Bagian Hukum &amp; Kepatuhan Grup. Hukum &amp; Kepatuhan Grup akan mendukung pengenalan solusi teknis untuk pemantauan rutin seperti itu berdasarkan praktik terbaik yang telah ditetapkan Grup HC.</b></p>	<p>7.2.2. As a general precautionary measure each country head arranges for a register of all HC Group employees in its area of responsibility active in <b>business</b> associations to facilitate training and monitoring of strict adherence to competition law in this regard. <b>Furthermore, each HC country head will introduce an electronic monitoring system to secure spot checks of the electronic communication of employees with high anti-trust risk exposure (E-Mail Protection System/EMPS) as outlined in the EMPS Policy, unless such system is either not legally permissible or inappropriate as concluded together with Group Legal &amp; Compliance. Group Legal &amp; Compliance will support the introduction of the technical solution for such regular monitoring based on HC Group's established best practice.</b></p>
<p>7.2.3 Atas permintaan dari Vorstand atau manajemen senior lainnya, Departemen Internal Audit Group melakukan penelaahan untuk memberikan kepastian kepada Vorstand bahwa peraturan telah dipatuhi. Rencana audit untuk melakukan inspeksi di lokasi dalam rangka memeriksa kepatuhan terhadap hukum persaingan yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal Group akan disusun dan dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal ada kondisi yang mencurigakan, audit khusus dapat dilakukan atas permintaan khusus dari Vorstand atau Group <b>Legal &amp; Compliance.</b></p>	<p>7.2.3. On request of the Vorstand or other senior management, Group Internal Audit undertake reviews to provide the Vorstand with reasonable assurance that regulations are complied with. An audit plan for on-site inspections of competition law compliance issues by Group Internal Audit is prepared and implemented yearly. In case of suspicious circumstances, special audits may be launched at the specific request of the Vorstand or Group <b>Legal &amp; Compliance.</b></p>
<p>7.3. Karyawan yang melakukan pelanggaran hukum persaingan di lingkungan kerja mereka diharapkan untuk memberitahu atasan mereka segera melalui pendekatan personal yang kemudian akan dikonsultasikan dengan manajer kepatuhan masing-masing mengenai langkah-langkah selanjutnya. Jika mereka tidak ingin</p>	<p>7.3. Employees who encounter competition law violations in their working environment are expected to inform their superior of this immediately by way of personal approach who will consult with the respective compliance manager</p>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>memberitahu atasan mereka, <b>kontak hotline kepatuhan</b> dapat mereka gunakan untuk memberikan informasi kepada manajer kepatuhan secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan terhadap hukum persaingan, jika, dalam kasus luar biasa, karyawan tidak dapat berkonsultasi - atau tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari atasan mereka atau legal department. <b>Instruksi ini juga berlaku, apabila tersangka pelanggaran hukum persaingan terkait dengan perilaku agen penjualan pihak ketiga yang secara aktif terlibat dalam rantai distribusi HC Group.</b></p>	<p>about the next steps. If they do not wish to inform their superior, the existing compliance hotline allows them to inform the compliance manager directly in confidence. The same applies to questions about compliance with competition law, if, in an exceptional case, the employees cannot consult – or cannot obtain the necessary information from – their superior or the legal department. <b>This instruction applies also, if the suspect of competition law infringements relates to the behaviour of third-party sales agents actively involved in the distribution chain of HC Group.</b></p>
<p><b>8. Pelaporan</b></p>	<p><b>8. Reporting</b></p>
<p>Unit-unit nasional (Kepala Bagian Hukum) akan melaporkan insiden hukum persaingan kepada <b>Group Legal &amp; Compliance</b> empat kali dalam setahun melalui sistem pelaporan hukum. Dari laporan-laporan ini, <b>Group Legal &amp; Compliance</b> akan membuat Ringkasan Laoran Status Kasus Cartel untuk diserahkan kepada Vorstand. <b>Pelaporan ad-hoc harus segera diberikan oleh kepala organisasi di negara masing-masing kepada anggota Direksi yang kompeten dan Kepala Biro Hukum kepada Group Legal &amp; Compliance tentang kejadian-kejadian serius termasuk investigasi baru atau klaim yang diajukan melalui pengadilan terhadap anggota perusahaan HeidelbergCement Group atas pelanggaran peraturan persaingan dan perkembangan kasus yang sedang terjadi (keputusan pengadilan, sidang pemeriksaan yang penting dll.) <u>Lampiran 2</u> berisi template isi dari laporan-laporan tersebut. Dalam hal penyelidikan baru menyebabkan timbulnya biaya yang cukup besar, <b>Group Legal &amp; Compliance</b> wajib terlibat, memberikan dukungan untuk mengkoordinasikan perkara di wilayah setempat dan terus memberikan informasi kepada Vorstand.</b></p>	<p>The national units (Heads of Legal) report competition law incidents to <b>Group Legal &amp; Compliance</b> four times a year via the competition law reporting system. From these reports, <b>Group Legal &amp; Compliance</b> produces the Summarized Status Report Cartel Cases for submission to the Vorstand. <b>Immediate ad-hoc reporting is compulsory for the respective country heads to the competent Board member and the Head of Legal to Group Legal &amp; Compliance for serious incidents including any new investigations or court claims against members of HeidelbergCement Group regarding infringements of competition rules and decisive new developments in on-going cases (court decisions, important hearings etc.). <u>Annex 2</u> contains a template for the main content of such reports. In the event of new investigations that may lead to considerable charges, <b>Group Legal &amp; Compliance</b> is obliged to become involved, support to co-ordinate the process locally and keep the Vorstand informed on an on going basis.</b></p>
<p><b>9. Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi investigasi hukum persaingan</b></p>	<p><b>9. Conduct in the event of competition law investigations</b></p>
<p>9.1 Dalam hal dilakukan investigasi hukum persaingan, khususnya penggeledahan, kemungkinan untuk mempengaruhi hasil investigasi biasanya sangat kecil.</p> <p>9.2 Agar penggeledahan dilakukan secara tertib dan melindungi hak-hak pembelaan dengan cara yang sebaik mungkin, tindakan-tindakan berikut ini sangat penting untuk dipatuhi kecuali disyaratkan lain oleh hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Segera memberitahu pihak manajemen dan departemen hukum!</li> </ul>	<p>9.1. In the event of competition law investigations, particularly searches, the possibility of influencing the outcome is normally very limited.</p> <p>9.2. In order to allow the searches to be conducted in an orderly manner and to protect the rights of defence in the best possible way, the following conduct is imperative, except as expressly required otherwise by law:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inform the management and legal department immediately!</li> </ul>

**HEIDELBERGCEMENT**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mintalah surat perintah penggeledahan dan kartu identitas petugas dan mencatat nama-nama mereka!</li> <li>- Mengawal petugas dalam melakukan semua penggeledahan!</li> <li>- Mengizinkan petugas melakukan penggeledahan, tidak menghalanginya, tetap pasif; jangan memberikan bantuan secara aktif, jangan memberikan informasi apapun dan, terutama, jangan membuat pernyataan apapun tentang kasus! Jika undang-undang lokal mewajibkan Anda untuk bekerjasama, berikan pernyataan hanya sebatas yang diperlukan, hanya untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu saja, dan hanya jika Anda memiliki pengetahuan langsung tentang <b>fakta</b> tersebut! Paksakan agar anda hadir ditemani oleh pengacara selama wawancara!</li> <li>- Ajukan keberatan secara formal atas penyitaan dokumen atau barang-barang dan cacat tindakan tersebut, anda dapat meminta salinan dari dokumen-dokumen yang disita demi kepentingan mempertahankan kegiatan usaha!</li> <li>- Mintalah catatan lengkap penggeledahan dan daftar dokumen dan barang yang disita!</li> </ul> <p>9.3 Petunjuk-petunjuk tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan akan diberikan kepada karyawan yang mungkin menghadapi penyelidikan tersebut (termasuk kepada karyawan resepsionis). Petunjuk-petunjuk itu juga berisi definisi yang jelas dari penanggungjawab, data kontak mereka dan garis pelaporan yang sesuai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ask to see the search warrant and the officers' identification cards and take down their names!</li> <li>- Accompany the search officers throughout the search!</li> <li>- Allow the search to be carried out and do not obstruct it, remaining passive; do not actively assist, do not give any information and, in particular, do not make any statements about the case! If the local legislation includes a duty to co-operate, make statements only to the extent required, to specific questions only, and only if you have direct knowledge of the <b>facts</b> in question! Insist on the presence of a lawyer during your interview!</li> <li>- Formally object to the seizure of documents or items and put this on record; ask that copies of seized documents may be made, in the interests of maintaining business operations!</li> <li>- Ask for a detailed search record with a list of seized documents and items!</li> </ul> <p>9.3. Instructions describing the necessary actions are to be made available to those employees that might be faced as a first contact with such investigations (including receptionist). The instructions shall include clear definitions of the responsible people, their contact details and appropriate reporting lines.</p>
<p><b>10. Pelaksanaan dan Persyaratan Minimum Yang Wajib Tercantum dalam Pedoman Hukum Persaingan Nasional</b></p>	<p><b>10. Implementation of and minimum requirements for national competition law guidelines</b></p>
<p>10.1 Pedoman Hukum Persaingan Group ini harus diterapkan di semua negara melalui pedoman hukum persaingan di negara masing-masing sebagai dasar program kepatuhan <i>anti-trust</i> nasional. Penerapan khusus di negara tertentu tidak wajib dilakukan di negara-negara di mana hukum persaingan nasional tidak menyimpang dari posisi hukum yang dijelaskan dalam Pedoman ini dan penjelasan lebih rinci tentang posisi hukum tersebut tidak diperlukan.</p> <p>10.2 Pedoman nasional suatu negara dan program kepatuhan dapat menetapkan aturan perilaku yang lebih mengena dari Pedoman Group ini, secara khusus jika diperlukan atau dianjurkan di bawah undang-undang persaingan nasional yang berlaku dan penegakannya, namun tetap harus memasukkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan ini sebagai</p>	<p>10.1. This Group Competition Law Guideline must be implemented in all countries by means of national competition law guidelines as the basis for the national antitrust compliance programmes. Separate country specific implementation is not required in countries where the national competition law does not deviate from the legal position described in this Guideline and a more detailed exposition of the legal position is not required.</p> <p>10.2. A country's national guideline and compliance programme may lay down more far-reaching rules of conduct than are contained in this Group Guideline in particular if required or advisable under applicable national competition laws and its enforcement, but must incorporate the rules set out here as minimum requirements. They must at least include clear statements setting out:</p>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>persyaratan minimum. Sekurang-kurangnya, aturan-aturan nasional wajib mencakup pernyataan-pernyataan yang jelas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab,</li> <li>- Hal-hal mendasar yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari hukum kartel,</li> <li>- Konsekuensi hukum dan tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap pelanggaran atas hukum persaingan,</li> <li>- Aturan perilaku yang paling penting,</li> <li>- Langkah-langkah informasi dan pelatihan,</li> <li>- Dokumentasi, pemantauan dan kontak hotline,</li> <li>- Pelaporan,</li> <li>- Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi investigasi hukum kartel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The responsibilities,</li> <li>- The basic “dos and don’ts” of cartel law,</li> <li>- The legal consequences and actions taken in response to competition law violations,</li> <li>- The most important rules of conduct,</li> <li>- Information and training measures,</li> <li>- Documentation, monitoring and hotline,</li> <li>- Reporting,</li> <li>- Conduct in the event of cartel law investigations.</li> </ul>
<p><b>11. Peraturan Kepatuhan Semen Abu Khusus untuk Negara EEA</b></p>	<p><b>11. Specific Grey Cement/Cementitious compliance rules for EEA Countries</b></p>
<p>Setelah penyelidikan yang panjang dari Komisi Eropa (EEA) atas pasar semen abu-abu di negara-negara Eropa, HeidelbergCement memutuskan untuk mematuhi aturan kepatuhan tertentu terkait semen abu-abu dan bisnis produk semen lainnya di semua negara EEA (= semua negara anggota Uni Eropa dan Islandia, Liechtenstein dan Norwegia), yang terdapat dalam Lampiran 3. Serta tunduk pada setiap peraturan daerah yang berlaku secara ketat (mis. sebagaimana berlaku untuk bisnis Britania Raya sebagai konsekuensi dari penyelidikan pasar Inggris) aturan kepatuhan ini harus dilaksanakan sebagai standar minimum di semua negara EEA dengan cara pedoman hukum persaingan nasional dan dipatuhi sejak 1 Mei 2016.</p>	<p>Following a long lasting investigation of the European Commission of the grey cement markets in certain European countries HeidelbergCement decided to adhere to certain compliance rules in its grey cement and cementitious products business in all EEA countries (= all EU member states and Iceland, Liechtenstein and Norway), which are laid out in Annex 3. Subject to any applicable stricter local regulations (e.g. as applicable for the UK business as consequence of the UK market investigation) these compliance rules must be implemented as a minimum standard in all EEA countries by means of national competition law guidelines and adhered to from 1 May 2016 on.</p>
<p><b>Untuk informasi lebih lanjut hubungi:</b></p> <p>Dr. Norbert Boese Group Legal &amp; Compliance Telepon: +49 (0) 6221/481-13 464 Fax: +49 (0) 6221/481-13 705 norbert.boese@heidelbergcement.com</p>	<p><b>For more information, contact:</b></p> <p>Dr. Norbert Boese Group Legal &amp; Compliance Phone: +49 (0) 6221/481-13 464 Fax: +49 (0) 6221/481-13 705 norbert.boese@heidelbergcement.com</p>



**Daftar Penilaian Hukum Persaingan Tahunan Sangat Rahasia**  
**Check list for yearly Competition Law Assessment Strictly confidential**

	<b>Pertanyaan/Aspek</b> <b>Question/aspect</b>	<b>Relevan Pada</b> <b>Bisnis/Perusahaan</b> <b>Apa? (Jika lebih dari</b> <b>satu)</b> <b>Relevance for which</b> <b>business</b> <b>line/company (if</b> <b>more than one)</b>	<b>Tindakan yang</b> <b>dibutuhkan dan jika</b> <b>ada, tindakan seperti</b> <b>apa dan kapan?</b> <sup>2</sup> <b>Action necessary and</b> <b>if so which action at</b> <b>what time?</b>	<b>Keterangan</b> <b>Remarks</b>
<b>I</b>	<b>Umum</b> <b>General</b>			
1	Hukum Persaingan Ditegakkan? <i>Competition law in force?</i>			
2	Otoritas Kompetisi ada dan aktif? <i>Competition Authority established and active?</i>			
3	Peringatan Peraturan disebar dan digunakan? <i>Leniency rules existent and used?</i>			
4	Perubahan yang relevan atas hukum persaingan dan praktiknya oleh masing-masing otoritas atau pengadilan <i>Relevant changes/ amendments of competition law and its practice by the respective authority or court</i>			
<b>II</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b> <b>Education and training</b>			
1	Pelatihan hukum persaingan yang berkala diimplementasikan dan diperbarui: Apakah semua orang yang berisiko diikutsertakan? (termasuk karyawan baru?) <i>Regular competition law training routine implemented and updated: Are all at risk persons included (incl. any new employees)?</i>			
2	Apakah pelatihan khusus diperlukan (contoh sehubungan dengan akuisisi atau perubahan struktur ? <i>Are special trainings required (e.g. due to acquisitions or</i>			

<sup>2</sup>Assessment should take into account the size of the respective (part of) business, risk of fines and potential amounts of such fines.

Penilaian harus mempertimbangkan ukuran (bagian dari) bisnis, risiko denda, dan potensi jumlah denda tersebut.

**HEIDELBERGCEMENT**

	restructurings or relevant changes/amendments in competition law and its practice)?			
III	<b>Tindakan Kepatuhan Khusus Lainnya</b> Further special compliance actions			
	Apakah tindakan kepatuhan hukum persaingan khusus diperlukan? <sup>3</sup> Are special competition law compliance activities required?	n/a	n/a	Contoh: Penyelidikan internal; layar data; dawn raids tiruan; pelaporan kontak pesaing Examples: Internal investigations; data screens; mock dawn raids; competitor contact reporting
1	Karena standar hukum lokal (termasuk segala perubahan atas standar tersebut) due to local legal standards/best practices (including any changes/amendments of these standards)			
2	Karena tindakan yang diperkirakan/diumumkan oleh otoritas persaingan due to expected/announced actions of competition authority (e.g. sector inquiries)			
3	Karena pelepasan yang direncanakan atau akuisisi yang dilaksanakan due to planned disposals or executed acquisitions			
4	Karena alasan lain (keadaan mencurigakan yang dibuat /informasi yang diterima selama bekerja: perkembangan pasar yang signifikan seperti penurunan permintaan, lebih dari kapasitas, tekanan harga tertentu due to other reasons (suspicious experiences made/information received during regular work; significant market developments like decreasing demand, over capacity, specific pricing pressure.)			

<sup>3</sup> To be checked under local competition law and practice.  
Untuk diperiksa di bawah hukum dan praktik persaingan setempat.

## Lampiran 2/Annex 2

## Konten Utama Laporan Cartel

Lanjutan Proceeding	Uraian Umum General Description	Perusahaan yang terpengaruh Affected Company	Status Status	Potensi Sanksi/ Tuntutan Potential Sanctions/ Claims	Pengacara luar External Lawyer	Ketentuan yang dibuat Provisions made
[Tuliskan nama/nomor file] [insert appropriate name/file number]	[Tuliskan uraian umum] [insert general description]	[Tuliskan nama perusahaan HC yang terpengaruh] [insert name(s) of affected HC companies]	[Beri uraian tentang status saat ini] [describe current status]	[Jelaskan potensi sanksi yang sejauh mungkin dapat dikenakan] [outline potential sanctions as far as possible]	[Sebutkan firma hukum yang telah ditunjuk, jika ada] [insert mandated law firm, if any]	[Masukkan ketentuan atau laporan nihil] [insert provision or nil report]

## Lampiran 3

**ATURAN KEPATUHAN EEA KHUSUS**  
**SPECIFIC EEA COMPLIANCE-RULES**

<p><b>Pengantar</b></p> <p>Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebaliknya, aturan kepatuhan EEA tertentu (i) mengacu pada semen (yaitu, semen abu-abu) dan produk semen lainnya (yaitu, GGBS, GBS, dan <i>fly ash</i>) saja, dan (ii) berlaku untuk seluruh EEA (<i>European Economic Area</i> = negara anggota Uni Eropa, Islandia, Liechtenstein dan Norwegia).</p>	<p><b>Introduction</b></p> <p>Unless explicitly stated otherwise, the specific EEA compliance rules (i) refer to cement (i.e., grey cement) and cementitious products (i.e., GGBS, GBS, and fly ash) only, and (ii) apply to the entire EEA (European Economic Area = EU members states and Iceland, Liechtenstein and Norway).</p>
<p><b>I. PENANGANAN DAN TRANSMISI DATA STATISTIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecuali jika diminta oleh instansi pemerintah, HC tidak akan memberikan secara langsung, atau tidak langsung melalui asosiasi perdagangan non-publik terkait informasi individu yang setidaknya telah berusia enam bulan dalam hal penjualan, produksi, impor/ekspor, semen tertentu atau produk semen lainnya.</li> <li>2. Jika tidak disetujui oleh masing-masing Otoritas Kompetisi nasional, HC hanya akan memungkinkan setiap asosiasi perdagangan untuk melanjutkannya dengan pertukaran informasi tersebut di atas asalkan itu dilakukan melalui organisasi swasta independen pihak ketiga atas dasar perjanjian kerahasiaan yang diverifikasi secara ketat dan harus membuat sistem keamanan yang tepat antara asosiasi tersebut dan anggotanya ("Perjanjian Kerahasiaan").</li> <li>3. Kecuali jika diperlukan oleh instansi pemerintah, HC tidak akan memberikan secara langsung, atau tidak langsung melalui asosiasi perdagangan non-publik, data individu sehubungan penjualan mereka, produksi, dan impor / ekspor yang setidaknya berusia satu tahun, kepada Negara Anggota atau wilayah administratif di mana HC tahu bahwa terdapat kurang dari empat pemasok data.</li> <li>4. Perjanjian Kerahasiaan harus ditandatangani oleh pihak ketiga organisasi swasta yang independen, asosiasi perdagangan dan anggotanya serta membutuhkan pihak ketiga organisasi swasta independen untuk menginformasikan asosiasi secara segera dan tidak mengungkapkan data masing-masing jika ada lebih sedikit dari empat pemasok data.</li> <li>5. HC harus membuat keanggotaan mereka dalam asosiasi perdagangan tergantung pada (i)</li> </ol>	<p><b>I. HANDLING AND TRANSMISSION OF STATISTICAL DATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unless required by government agencies, HC shall not provide directly, or indirectly through any trade association any non-public, individual information that is not at least six months old in respect of their sales, production, import/export, of specific cement or cementitious product types or lines.</li> <li>2. If not approved otherwise by a respective national Competition Authority, HC will only enable any trade association to proceed with any exchange of the aforesaid information provided it is made through an independent third-party private organization on the basis of strict verifiable confidentiality agreements which must create appropriate firewalls between such association and its members ("the Confidentiality Agreements").</li> <li>3. Unless required by government agencies, HC shall not provide directly, or indirectly through any trade association any non-public, individual data in respect of their sales, production, and import/export that is not at least one year old, with respect to Member States or administrative regions where HC knows that there are fewer than four suppliers of data.</li> <li>4. The Confidentiality Agreements should be signed by the independent third-party private organization, the trade association and the members thereof and require the independent thirdparty private organization to inform the association immediately and not to disclose the respective data if there are fewer than four suppliers of data.</li> <li>5. HC shall make their membership in any trade association dependent upon (i) the adherence by</li> </ol>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>kepatuhan oleh asosiasi tersebut untuk (a) Perjanjian Kerahasiaan disebut di atas dan (b) program kepatuhan (atau kode internal setara etik) yang meliputi aturan tentang pengumpulan, agregasi, atau publikasi data tersebut, serta perilaku dari setiap pertemuan atau bisnis asosiasi, dan (ii) penunjukan internal staf kepatuhan / fungsi dengan tanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau ketaatan asosiasi tersebut untuk program kepatuhan dan Perjanjian Kerahasiaan yang disebutkan di atas.</p>	<p>such association to (a) the Confidentiality Agreements referred to above and (b) a compliance program (or equivalent internal code of conduct) that shall include rules regarding the collection, aggregation, or publication of the data in question, as well as the conduct of any meeting or business of the association, and (ii) the appointment of an internal compliance officer/function with responsibility for implementing and monitoring the strict adherence of such association to the compliance program and the Confidentiality Agreements referred to above.</p>
<p><b>II. SURAT HARGA PENGUMUMAN</b></p>	<p><b>II. PRICE ANNOUNCEMENT LETTERS</b></p>
<p>6. HC tidak akan mengirim surat pengumuman harga secara umum kepada para pelanggannya.</p> <p>7. Surat harga akan menjadi umum jika tidak memiliki informasi pribadi apa pun yang berkaitan dengan pelanggan: (i) rincian kontak yang spesifik tentang pelanggan; (ii) persyaratan produk dan harga (yang berarti harga gross diusulkan untuk semen dan produk semen); dan (iii) tanggal efektif perubahan harga dimasa mendatang.</p>	<p>6. HC shall not send generic price announcement letters to its customers.</p> <p>7. Price letters are generic if they lack any of the following individual information about the customer: (i) customer specific contact details; (ii) product requirements and prices (meaning proposed gross price for cement and cementitious products); and (iii) the effective date of the envisaged price change.</p>
<p><b>III. TIDAK ADA PENGUNGKAPAN UMUM TENTANG RENCANA MENDATANG UNTUK HARGA DAN OUTPUT</b></p>	<p><b>III. NO PUBLIC DISCLOSURE OF FUTURE PLANS FOR PRICING AND OUTPUT</b></p>
<p>8. HC akan menghindari pengungkapan kepada publik di luar organisasi internalnya mengeni rencana strategis masa depan pada jumlah atau kebijakan harga dalam media apapun atau situs web perusahaan public yang dapat diakses, atau membuat pengumuman publik, kecuali dalam konteks hubungan pelanggan (atau tindakan lain sesuai dengan Bagian II.), atau pengungkapan keuangan (termasuk laporan audit analis, <i>road-show</i> keuangan, laporan tahunan dan pertemuan tahunan) atau untuk mematuhi kewajiban regulasi keuangan atau perusahaan yang berlaku.</p>	<p>8. HC will avoid disclosing publicly outside its internal organization its future strategic plans on quantities or pricing policy in any media or publically accessible company website, or otherwise making public announcements, except in the context of customer relations (or other measures in compliance with Section II.), or financial disclosures (including customary analyst reports, financial road-shows, annual reports and annual meetings) or to comply with any applicable financial or corporate regulatory obligation.</p>
<p><b>IV. PERJANJIAN SLAG</b></p>	<p><b>IV. SLAG AGREEMENTS</b></p>
<p>9. Karena secara kontrak GBS dan GGBS termasuk ke dalam produsen baja, HC akan memastikan kepatuhan kontrak tersebut dengan aturan antitrust Eropa untuk perjanjian vertikal.</p>	<p>9. As regards GBS and GGBS supply contracts entered into with steel manufacturers, HC will ensure the compliance of such contracts with European antitrust rules for vertical agreements.</p>
<p><b>V. MONITORING KOMITMEN</b></p>	<p><b>V. MONITORING OF COMMITMENTS</b></p>
<p>10. Dalam rangka untuk memastikan pemantauan yang tepat sesuai dengan komitmen di atas, setiap karyawan HC harus mempertahankan, untuk jangka waktu minimal dua tahun, semua</p>	<p>10. In order to ensure the appropriate monitoring of compliance with the above commitments, any HC employee shall retain, for a period of at least two</p>

**HEIDELBERGCEMENT**

<p>korespondensi internal dan eksternal (yaitu, e-mail, surat biasa dan fax, termasuk lampiran)</p> <p>(i) yang termasuk dalam salah satu kategori berikut</p> <p>(1) pertukaran informasi untuk keperluan statistik yang dibuat dalam konteks yang dijelaskan dalam Bagian I.;</p> <p>(2) surat pengumuman harga yang dikirim ke pelanggan, seperti yang dijelaskan dalam Bagian II.; atau</p> <p>(3) negosiasi perjanjian pasokan untuk mengambil slag; dan</p> <p>(ii) Jika dokumen sub (i) ditemukan dalam konteks kemungkinan penyelidikan pasal 101 dan 102 TFEU.</p>	<p>years, all internal and external correspondence (i.e., e-mail, ordinary mail and fax, including attachments)</p> <p>(i) that are included in any of the following categories</p> <p>(1) information exchange for statistical purposes made in the context described in Section I.;</p> <p>(2) price announcement letters sent to customers, as described in Section II.; or</p> <p>(3) negotiation of supply agreements for the take up of slag; and</p> <p>(ii) to the extent that documents sub (i) would be discoverable in the context of possible investigations under Articles 101 and 102 TFEU.</p>
---	---